

**ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM P2KP DI  
KOTA SEMARANG**

( Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan  
Kota Semarang Tahun 2000 - 2003)



**TESIS**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S – 2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dwi Prawani Sri Rejeki  
C4B002233

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

## Abstract

The Urban Poverty Project represents one of the Social Safety Net Programs in urban area which aims to overcome the poverty as the impact of economic crisis. The focus of this research is evaluated from the performance of Urban Poverty Project in Purwoyoso Village, Ngaliyan District, Semarang City in the year 2000 - 2003. The performance is evaluated from the relationship of guidance and working capital loans with income and savings as well as the difference between income and savings before and after the program.

The data analysis used in this research applies correlative analysis and variable test. From the calculation of the correlation coefficient ( $r$ ), between the income and guidance, there is a positive correlation as much as 0,9932 which means that the income has a close relationship to guidance. While the determination coefficient ( $r^2$ ) is equal to 0,9864 , which means that the income as much as 98,64% is determined by the guidance value, the rest as much as 1,36% is determined by onother factor. The calculation of correlation coefficient ( $r$ ), between the income and loan there is a positive correlation as much as 0,9883 which means that the income has a close relationship to loan. The calculation of correlation coefficient ( $r$ ), between the income and the savings as much as 0,9927 and the determination coefficient ( $r^2$ ) is equal to 0,9855 , which means that the savings as much as 98,55% is determined by the income, while the rest as much as 1,45% is determined by onother factor. The calculation of correlation coefficient ( $r$ ), between the guidance and the savings has correlation coefficient ( $r$ ) as much as 0,9997, while the calculation of correlation coefficient ( $r$ ) between the loan and the savings has correlation value as much as 0,9989. While the determination coefficient ( $r^2$ ) is equal to 0,9534 , which means that the savings as much as 95,34% is determined by the loan , while the rest as much as 1,36% is determined by onother factor.

The result from the various test analysis shows that the average monthly income of the program participants after the program undergoes an increase to 76,53% , while the average monthly savings of the program participants undergoes an increase to 95,23%. This shows that there is a good will from the participants to be independent and self-supported in capitalization to manage their own business independently in the future. Accordingly, the success of the Urban Poverty Project to overcome poverty through providing loans can be achieved.

To increase more success on Urban Poverty Project to overcome poverty, it is better that the loans should be given to all productive poor society until the participants of the program can really be independent in capitalization.

## ABSTRAKSI

Program P2KP merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi. Fokus penelitian ini adalah kinerja pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 – 2003 ditinjau dari hubungan pendampingan dan pinjaman modal dengan Pendapatan Usaha dan Simpanan Usaha, serta perbedaan Pendapatan Usaha dan Simpanan Usaha sebelum dan sesudah program.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi dan uji beda. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi ( $r$ ) antara pendampingan dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9932 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pendampingan. Sedangkan koefisien determinasinya ( $r^2$ ) = 0,9864, yang artinya bahwa pendapatan usaha sebesar 98,64% ditentukan oleh pendampingan, sisanya 1,36% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi ( $r$ ) antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9883 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pinjaman modal. Perhitungan koefisien korelasi ( $r$ ) antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha sebesar 0,9927 dan koefisien determinasinya ( $r^2$ ) = 0,9855, yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 98,55% ditentukan oleh pendapatan usaha, sisanya sebesar 1,45% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi antara pendampingan dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9997 sedang perhitungan koefisien korelasi antara pinjaman modal dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9989. Sedangkan koefisien determinasinya ( $r^2$ ) = 0,9534, yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 95,34% ditentukan oleh pinjaman modal dan sisanya 4,66% ditentukan oleh faktor lain. Dari hasil analisis uji beda memperlihatkan bahwa pendapatan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 76,53%, sedang simpanan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 95,23%, hal ini menunjukkan adanya kemauan dari peserta program berusaha untuk mandiri dalam permodalannya guna mengelola kegiatan usahanya secara mandiri di masa mendatang. Dengan demikian keberhasilan program P2KP dalam menanggulangi kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir dapat terwujud.

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program P2KP dalam menanggulangi kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir sebaiknya diberikan kepada seluruh warga miskin peserta program P2KP sampai benar – benar dapat mandiri dalam permodalannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	14
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	43
2.3. Hipotesis .....	44
<b>III METODE PENELITIAN</b>	<b>45</b>
3.1. Definisi Operasional .....	45
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	46
3.3. Populasi dan Sampel .....	47
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5. Skala Pengukuran .....	50
3.6. Teknik Analisis Data .....	51
3.7. Variabel penelitian .....	58
3.8. Analisis Data .....	58
<b>IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	<b>62</b>
4.1. Diskripsi Kelurahan Purwoyoso .....	62
4.2. Diskripsi Pelaksanaan Program P2KP .....	70
4.3. Diskripsi Profil Responden .....	75
<b>V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>89</b>
5.1. Diskripsi Kinerja Fasilitator Kelurahan .....	89
5.2. Analisis Korelasi .....	94
5.3. Uji Tanda Wilcoxon .....	101
<b>VI PENUTUP</b>	<b>104</b>
6.1. Kesimpulan .....	104
6.2. Saran .....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (1999), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bintoro (1988) bahwa pembangunan dapat diartikan pula sebagai suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum/rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda

Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Seperti halnya di Jawa Tengah, dimana program penanggulangan kemiskinan (Bina Usaha) yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pemerintah (JPS, P3EMDN, PPIKM, P4K, PPKM, PPSP, PIK, IDT, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Usaha Ekonomi Desa, Program pengentasan kemiskinan daerah pantai, dan Program pemulihan keberdayaan masyarakat).
- b. Program penyertaan partisipasi masyarakat/dunia usaha (Takesra, Kukesra, KPKU Prokesra, dan Program kredit Taskin DAKAB/YDSM).
- c. Program Bantuan Luar Negeri (P2KP dan PPK).
- d. Skim Kredit (KUT, KKOP, KKRS/SS, KMKBPR/Syari'ah, KMKUKM, KPTTG, dan KPTPUD).

Upaya itu telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai jumlah 4.1 juta jiwa (13,91 %) tahun 1996. Namun setelah terjadi krisis sejak tahun 1997 telah berdampak negatif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang semula telah menunjukkan hasil, justru akumulasi penduduk miskin meningkat pada akhir tahun 1998 yakni 11,14 juta jiwa (36,70 %). Ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin 22,79 % selama dua tahun atau sama dengan 7,04 juta jiwa (BPS, 2003).

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Dengan semakin memburuknya keadaan ekonomi nasional menyebabkan masyarakat

berlomba - lomba untuk meningkatkan taraf kehidupannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota ini adalah menekan penghasilan kota, selain itu juga mengakibatkan kemiskinan kota. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena kota akan menjadi semakin padat dan memunculkan permukiman kumuh, sedangkan kemampuan kota untuk menampung jumlah penduduk yang terus meningkat justru semakin menurun, sehingga menuntut adanya suatu program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan budaya agar jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK, 2003) beberapa kelemahan upaya penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini antara lain:

1. Program - program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif.
2. Belum tersedianya instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang spesifik sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan di setiap daerah.
3. Berbagai kebijakan yang semula diproyeksikan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

4. Lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya peran masyarakat, LSM, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, terhambatnya komunikasi pembuat program dengan *stakeholders*.

Sedang menurut Bappeda Propinsi Jawa Tengah (2003), kelemahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu antara lain :

1. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro.
2. Kebijakan terpusat.
3. Lebih bersifat karitatif.
4. Memposisikan masyarakat sebagai obyek.
5. Cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi.
6. Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama.

Sehubungan dengan itu perlunya pola baru dalam penanganan kemiskinan yang lebih berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan upaya – upaya masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Oleh karena itu pemahaman tentang data kemiskinan sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.

Berbagai kondisi kemiskinan dapat dipresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data yang bersifat mikro (Bappenas 2003) :

1. Data makro, merupakan data agregat tentang jumlah dan persentase penduduk miskin dan variabel kemiskinan lainnya pada tingkat nasional dan wilayah



(propinsi dan kabupaten/kota). Sumber data makro sebagian besar bersumber dari BPS yang merupakan institusi yang menyediakan data dalam lingkup nasional.

2. Data mikro lebih bersifat operasional yang idealnya mampu menyajikan informasi siapa itu si miskin, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan, yang direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/RW atau desa/kelurahan). Data kemiskinan yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (seperti nama kepala keluarga, alamat dan status sosial – ekonomi tertentu).

Data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Batas, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah**  
**Tahun 1990 – 2002**

Tahun	Batas Miskin (Rp/kapita/bln)		Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990	18.648	12.267	22,00	15,83	17,49	1.585,3	3.330,1	4.915,4
1993	24.204	16.725	17,36	15,10	15,78	1.526,0	3.092,8	4.618,7
1996	40.075	30.499	20,67	22,05	21,61	1.973,4	4.444,2	6.417,6
1999	88.384	72.210	27,80	28,05	28,46	3.032,2	5.723,2	8.755,4
2002	121.461	97.310	20,50	24,96	23,06	2.762,3	4.546,0	7.308,3

Sumber : BPS Tahun 2003

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin dan Batas Miskin**  
**Menurut Kota Di Jateng**  
**Tahun 2002 - 2004**

Kota	Jumlah Penduduk (000 orang)			Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bln)		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Magelang	116,49	119,40	123,57	16,4	17,7	17,4	120.406	141.580	163.503
Surakarta	488,16	485,50	505,15	69,4	72,8	69,5	108.328	131.084	154.749
Salatiga	163,07	158,11	164,97	20,1	18,3	16,0	106.103	128.016	136.729
Semarang	1.455,99	1.389,41	1.406,23	103,4	91,8	79,0	111.696	124.653	133.814
Pekalongan	265,82	271,41	273,63	26,3	20,7	18,6	95.947	108.653	139.571
Tegal	238,05	242,11	240,78	31,7	23,1	23,1	115.809	137.953	167.621

Sumber : BPS Tahun 2005

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Keluarga Miskin di Kota Semarang**  
**Tahun 2000 - 2003**

Tahun	Keluarga Miskin (Pra KS)	Keluarga Miskin I (KS I)	Pra KS + KS I	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Persentase Keluarga Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4):(5)
2000	42.285	70.435	112.720	330.580	34,10
2001	42.119	70.946	113.065	329.082	34,36
2002	44.013	74.945	118.958	316.338	37,60
2003	44.358	77.797	122.155	322.734	37,85

Sumber : Pendataan Bappeda Kota Tahun 2003 (diolah)

Berdasarkan data di atas , masalah kemiskinan masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, jika kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I digunakan sebagai indikator kemiskinan.

Upaya Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral, sosial, hukum maupun politik bagi bangsa Indonesia. Sila ke lima Pancasila menyebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan apa usaha kita termasuk pejabat di pusat atau daerah, lembaga sosial, organisasi non pemerintah serta masyarakat, untuk mewujudkan sila tersebut ? Mengapa

kemiskinan masih terlihat dimana – mana, jelas kita belum berhasil mewujudkan sila tersebut.

Menurut Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) dan Lembaga Penelitian SMERU (2001), setidaknya ada empat aspek utama mengapa usaha penanggulangan kemiskinan menjadi penting bagi daerah maupun secara nasional, yaitu :

a. Aspek kemanusiaan :

Menjalankan misi kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan hak azasi yang dimiliki;

- Agar kehidupan masyarakat semakin adil dan makmur.

b. Aspek ekonomi :

- Mengeluarkan penduduk dari belenggu keterbelakangan ekonomi;
- Mengubah orang miskin dari hanya sebagai beban masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di daerah;
- Memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah;
- Meningkatkan pendapatan penduduk, memperluas permintaan pasar dan mengembangkan transaksi ekonomi diberbagai pelosok daerah;
- Menciptakan keadilan dalam bentuk adanya pemerataan kesempatan memperoleh hasil pembangunan.

c. Aspek sosial dan politik

- Mengurangi kecemburuan sosial di tengah – tengah masyarakat yang sifatnya sangat majemuk;
- Meniadakan kerawanan sosial yang karena adanya usaha provokasi untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan daerah dan negara secara luas;
- Menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif masyarakat;
- Menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang lebih demokratis baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

d. Aspek keamanan

- Menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai, jauh dari konflik sosial dan politik yang meresahkan penduduk;
- Meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan tingkat kriminalitas.

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Bentuk pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang sifatnya bergulir maupun hibah. Dana pinjaman P2KP merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada kelompok – kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja,

sepengetahuan penanggung jawab operasional (PJOK) yang ditunjuk dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja suatu usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

2. Memberikan bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian masyarakat mampu melakukan kegiatan - kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka penanggulangan berbagai masalah kemiskinan yang dihadapi.

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal – hal berikut :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha – usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.

4. Penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Melalui program ini keluarga miskin (keluarga pra KS dan keluarga KS I dengan alasan ekonomi) ditumbuhkan minat dan gairahnya untuk berwirausaha dan dibantu untuk mengembangkannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan sosial ekonominya sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera agar dapat lepas dari keterbelakangan sosial, ekonomi dan budaya.

Keinginan dan semangat meningkatkan usaha ini akan muncul manakala keluarga – keluarga yang bersangkutan memahami dengan pasti manfaat dana pinjaman dan pendampingan dari P2KP serta mendapatkan pada saat yang tepat dan dukungan lainnya yang memungkinkan keluarga tersebut mengembangkan potensinya. Dengan memahami arti dan manfaat dana pinjaman dan pendampingan dari P2KP yang disalurkan kepada mereka kemungkinan akan lebih efektif, jika dibandingkan apabila mereka kurang memiliki semangat berusaha dan belum memahami dengan pasti manfaat bantuan dana P2KP.

P2KP tahap 1- 1 di kota Semarang dilaksanakan di 57 Kelurahan dari 13 Kecamatan dan meliputi 2.699 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dana pinjaman program P2KP yang diterimakan setiap kelurahan berkisar antara Rp.250 juta hingga Rp.750 juta tergantung luas wilayah, jumlah penduduk kelurahan dan pendapatan rata – rata (*income*) penduduk. Di Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang mulai pertengahan tahun 2000 mendapat program P2KP untuk empat kelurahan yaitu Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Kedungpani. Sebagai realisasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi keluarga pra KS dan keluarga KS I, maka program P2KP di Kecamatan Ngaliyan khusus Kelurahan Purwoyoso sudah pada tahap 1 – 2 artinya dalam pelaksanaan P2KP tahap 1- 1 memiliki peluang untuk tidak terciptanya keberlanjutan dalam upaya - upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

Dari alasan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari tahu sejauh mana keberhasilan pemanfaatan pinjaman dana dan pendampingan program P2KP dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 - 2003).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Walaupun program – program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan namun jumlah keluarga miskin semakin meningkat. Hal tersebut juga terlihat dari hasil pendataan pentahapan keluarga miskin oleh Bappeda Kota Semarang tahun 2003 dari jumlah 322.734 kepala keluarga 37,85% termasuk kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I, tahun 2002 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 37,60%, tahun 2001 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 34,36%, dan tahun 2000 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 34,10%. Dari hasil pendataan tersebut terlihat bahwa penduduk miskin dari tahun

ke tahun semakin meningkat. Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini mengapa beberapa program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan namun jumlah keluarga miskin semakin meningkat, ini berarti efektifitas program tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab dari hal tersebut diatas adalah kurang akuratnya data tentang kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

P2KP sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, pada akhirnya keberhasilan program diukur sejauh mana tujuan dan manfaat upaya tersebut dapat dicapai dan dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Fakel Pendampingan Program P2KP ?
2. Apakah ada hubungan antara pendampingan dan pinjaman modal dengan pendapatan usaha ?
3. Apakah ada hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha ?
4. Apakah ada hubungan antara pendampingan dan pinjaman modal dengan simpanan usaha ?
5. Apakah ada perbedaan pendapatan usaha dan simpanan usaha sebelum dan sesudah program ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana pinjaman dan pendampingan teknis program P2KP di wilayah Kelurahan Purwoyoso



Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.

#### **b. Tujuan Khusus**

1. Mengevaluasi kinerja Faskel pendampingan program P2KP.
2. Menganalisis hubungan antara pendampingan dengan pendapatan usaha dan pinjaman modal dengan pendapatan usaha peserta program.
3. Menganalisis hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha peserta program.
4. Menganalisis hubungan antara pendampingan dengan simpanan usaha dan hubungan antara pinjaman modal dengan simpanan usaha peserta program.
5. Menganalisis perbedaan pendapatan usaha sebelum dan sesudah program.
6. Menganalisis perbedaan simpanan usaha sebelum dan sesudah program.

#### **c. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

1. Pengambil kebijakan dan keputusan mengenai Program P2KP agar dapat sesuai dengan kondisi riil dalam pelaksanaan serta dapat mengatasi hambatan – hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan program.
2. Masyarakat atau KSM dalam upaya pemanfaatan dana pinjaman program P2KP secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha dan simpanan usaha yang mereka lakukan.
3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama sebagai penambah referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Dari hasil penilaian kinerja Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Puewoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan hasil nilai rata – rata dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Puewoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP .
2. Dari hasil uji korelasi :
  - a. Antara pendampingan dengan pendapatan usaha nilai r masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,9879, usaha jasa sebesar 0,9435 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9932. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha, yang artinya semakin efektif kegiatan pendampingan maka semakin besar pendapatan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya ( $r^2$ ) usaha perdagangan sebesar 0,9759, usaha jasa sebesar 0,8902 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9864, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pendampingan dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha. atau pendapatan usaha sebesar 98,64%

- ditentukan oleh pendampingan dan 1,36% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.
- b. Antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha menunjukkan bahwa nilai  $r$  sebesar 0,9804 untuk usaha perdagangan, usaha jasa sebesar 0,9495 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9883, yang artinya ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal maka akan semakin besar pula pinjaman modal.
- c. Antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha nilai  $r$  masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,8791, usaha jasa sebesar 0,9823 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9927. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha, yang artinya semakin besar pendapatan usaha maka akan semakin besar pula simpanan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya ( $r^2$ ) masing – masing 0,7728 untuk usaha perdagangan, 0,9649 untuk usaha jasa dan 0,9855 untuk usaha jasa. Ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha sebesar 98,55% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha, atau simpanan usaha sebesar 98,55% ditentukan oleh pendapatan usaha dan 1,45% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.
- d. Antara pendampingan dengan simpanan usaha nilai  $r$  masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,9670, usaha jasa sebesar 0,9725 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9997. Jadi kesimpulannya ada

hubungan positif antara pendampingan dengan simpanan usaha yang artinya semakin efektif kegiatan pendampingan maka semakin besar pula simpanan usaha.

e. Antara pinjaman modal dengan simpanan usaha menunjukkan bahwa nilai  $r$  sebesar 0,9493 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9764 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9989 yang artinya ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan simpanan usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal maka akan semakin besar pula simpanan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya ( $r^2$ ) masing – masing 0,9012 untuk usaha perdagangan , 0,9534 untuk usaha jasa dan 0,9978 untuk usaha jasa. Ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel pinjaman modal sebesar 95,34% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha, atau simpanan usaha sebesar 95,34% ditentukan oleh pinjaman modal dan 4,66% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

3. Dari hasil analisis uji beda Wilcoxon :

a. Menunjukkan telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) pendapatan usaha dari rata - rata per bulan sebesar Rp.808.300,- pendapatan usaha awal ( $X_3$ ) sebelum program menjadi rata – rata per bulan sebesar Rp.1.426.900,- yang berarti meningkat sampai 76,53% per bulan pendapatan usaha akhir ( $X_3^1$ ) sesudah program.

b. Menunjukkan telah terjadi peningkatan simpanan usaha dari rata - rata per bulan sebesar Rp. 42.390,- simpanan usaha awal (Y) sebelum program menjadi rata – rata per bulan sebesar Rp. 82.760,- meningkat sampai 95,23 % per bulan simpanan usaha akhir (Y<sup>1</sup>) sesudah program. Hal ini berarti bahwa Program P2KP telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup peserta program dan pinjaman dana bergulir program P2KP bermanfaat bagi kelangsungan usaha mereka dimasa yang akan datang.

## 6.2. Saran

1. Program pendampingan P2KP yang mampu memahami dinamika dan prinsip – prinsip yang berlaku dalam pasar tradisional berpotensi meningkatkan kesejahteraan KSM beserta keluarganya, maka kebijakan pemerintah yang peduli seyogyanya tidak sekedar dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja dengan bunga murah melainkan kemudahan mengakses dan fasilitasi pendampingan usaha.
2. Untuk pendampingan sebaiknya dilakukan secara terus menerus dengan pengkaderan Faskel (pendamping pendampingan) yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan usaha ekonomi produktif sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terwujud.
3. Perlu diadakan pertemuan seperti lokakarya, saresehan dan apapun bentuknya yang mempertemukan antar kelompok – kelompok KSM sebagai sarana tukar pengalaman dalam pelaksanaan program P2KP. Adanya hal ini akan semakin mampu mengembangkan kelompok – kelompok KSM yang ada di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

### **6.2.1. Implikasi Kebijakan**

Jumlah warga miskin (Gakin) yang belum terjangkau oleh program P2KP diharapkan dapat terjangkau oleh program – program penanggulangan kemiskinan yang lain dengan koordinasi yang baik antara instansi – instansi yang terkait dengan BKM untuk penyaluran dananya agar tidak salah sasaran, sehingga penanggulangan kemiskinan akan dapat semakin cepat tertanggulangi.

### **6.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Jika ada peneliti lain yang berminat untuk meneliti program P2KP selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi gambaran secara menyeluruh maka disarankan untuk melakukan analisis faktor – faktor yang berperan secara utuh dalam usaha meningkatkan pendapatan, seperti faktor manajerial, kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan.